



POLICY BRIEF

Maret 2022

Pemetaan Aktor Untuk Keuangan Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kehutanan (HTI) dan Industri Perkebunan (Kelapa Sawit) di Provinsi Papua

Aenunaim, Linda Rosalina, Armand Ronald

Konten Isi

LATAR BELAKANG

TUJUAN

METODE KAJIAN

PEMBAHASAN

■ Pemetaan Aktor
■ Peran Aktor

REKOMENDASI

REFERENSI

DAFTAR SINGKATAN

LATAR BELAKANG

Komitmen jangka panjang Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) untuk mendukung upaya program ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan yang di implementasikan melalui roadmap kedua tahun 2015-2025 dibawah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. Adapun target capaian untuk mendukung percepatan keuangan berkelanjutan menurut OJK adalah:

- peningkatan pasokan dan permintaan dana
- penyusunan dan pelaksanaan instrumen keuangan yang ramah lingkungan





Pesan Kunci

- Pemerintah propinsi papua melalui visi pembangunan berkelanjutan 2100 menyatakan bahwa membangun Provinsi Papua berdasarkan keunikan karakteristik sosial budaya, alam dan pembangunan daerah.
- Struktur ekonomi Papua sangat dikendalikan oleh sektor pertambangan, dengan emas dan tembaga sebagai komoditi andalan.
- Pertambangan menciptakan produk regional Papua paling tinggi dan mendominasi struktur ekonomi wilayah, rata-rata 35,40% per tahun
- Kehutanan dan perkebunan sebagai sektor lahan lainnya, dinilai belum dikelola optimal menurut laporan infografis hasil pembangunan Provinsi Papua tahun 2020
- Kontribusi sektor Kehutanan dan Perkebunan terhadap PDRB Papua hanya sekitar 0,82-1,00% selama periode 2015-2019

c. penguatan pengawasan dan koordinasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Peta jalan aksi keuangan berkelanjutan merupakan proses pelaksanaan pada praktek industri keuangan yang mengedepankan pertumbuhan berkelanjutan dengan menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang mana setiap perusahaan harus memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai salah satu indikator capaian untuk mendukung keuangan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, roadmap keuangan berkelanjutan ini juga disusun untuk mendukung pelaksanaan SDGs dan RPJMN melalui aspek keuangan berkelanjutan diantaranya terpenuhinya kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik. Meskipun didalam prosesnya masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan terutama pada bank-bank yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk investasi beresiko tinggi seperti perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman (TuK, 2019)ⁱ.

Pemerintah Provinsi Papua melalui visi pembangunan berkelanjutan 2100 menyatakan bahwa membangun Provinsi Papua berdasarkan keunikan karakteristik sosial budaya, alam dan pembangunan daerah. Hal ini kemudian langkah yang ditempuh dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, Papua akan mengawal investasi yang masuk, agar aspek sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik, dapat terintegrasi secara keseluruhan dengan arah visi pembangunan berkelanjutan 2100. Tidak terkecuali untuk investasi pada sektor kehutanan dan perkebunan melalui Hutan Tanaman industri maupun kelapa sawit.

Secara keseluruhan Struktur ekonomi Papua sangat dikendalikan oleh sektor pertambangan. Ini disebabkan peranannya dalam menciptakan produk regional Papua paling tinggi dan mendominasi struktur ekonomi wilayah, rata-rata 35,40% per tahun, sehingga tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi Papua juga sangat ditentukan oleh variasi naik turunnya produksi tambang. Dua komoditi andalan di sektor pertambangan Papua selama ini adalah tembaga dan emas.

Terkait dengan sektor lahan lainnya khususnya kehutanan dan perkebunan, berdasarkan laporan infografis hasil pembangunan Provinsi Papua tahun 2020 menyebutkan bahwa Potensi sektor perkebunan yang begitu besar di Papua tampaknya belum dikelola optimal. Indikasinya dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Papua hanya





sekitar 0,82-1,00% selama periode 2015-2019, yang tampak tidak banyak mengalami perubahan dari tahun ketahun. Adapun komoditi andalan perkebunan Papua selama ini adalah kelapa sawit, kelapa dalam, sagu, dan coklat. Sedangkan pada sektor kehutanan lebih miris lagi yaitu kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Papua cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat sepanjang tahun 2015-2019 yang mengalami penurunan -0,043% per tahun. Dimana pada periode tersebut rata-rata kontribusi sektor kehutanan yang dimotori oleh hutan kayu terhadap PDRB Papua sebesar 1,38% per tahun. Sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Papua tahun 2019-2023 dengan visinya PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN yang ditujukan untuk Memantapkan Pembangunan yang didukung SDM Berkualitas dan Keamanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Lingkungan.

TUJUAN

Menjadi penting kemudian bagaimana proses indikator keuangan berkelanjutan dapat dipastikan menjadi salah satu solusi untuk mendukung perkembangan pembangunan provinsi papua yang harus Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan untuk menunjang Percepatan Pembangunan EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL Melalui Peningkatan Kemandirian kampung/ perkampungan. Oleh karena itu keterlibatan partisipatif para aktor yang berkepentingan seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian/Perkebunan, Bappeda, Perbendaharaan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, BPMPT, dan dinas lainnya yang terkait, Pengusaha/Investor (APHI/GAPKI), LJK dan OJK serta masyarakat sipil yang terkena dampak langsung dapat diharapkan bersama-sama mensukseskan pembangunan Papua sesuai visinya melalui kepastian keuangan yang berkelanjutan.

Pesan Kunci

- Kelapa sawit, kelapa dalam, sagu, dan coklat menjadi komoditi andalan perkebunan Papua.
- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Papua cenderung menurun.
- Sepanjang tahun 2015-2019 kontribusi sektor kehutanan mengalami penurunan -0,043% per tahun.
- Pada periode 2015-2019 rata-rata kontribusi sektor kehutanan yang dimotori oleh hutan kayu terhadap PDRB Papua sebesar 1,38% per tahun.

Untuk melanjutkan proses pengawasan sipil dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan tersebut kemudian Yayasan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) mencoba mengkaji:

- Mengidentifikasi peranan aktor/ lembaga pelaksana dan penerima manfaat
- Mengidentifikasi target dan capaian dari aktor penting dan berpengaruh





REFERENSI

- i <https://www.tuk.or.id/2019/12/keuangan-berkelanjutan-indonesia/>
- ii Hanneman, Robert A. and Mark Riddle. 2005. Introduction to social network methods. Riverside, CA: University of California, Riverside.
- iii Purnama F Y. 2015. NodeXL dalam Penelitian Jaringan Komunikasi Berbasis Internet. Vol 12 No. 1. Universitas Katolik Widya Mandala. Surabaya.
- iv Hansen D. L. 2011. Social Network Analysis. Measuring, Mapping and Modeling Collections of Connections. Analyzing Social Media Networks with NodeXL. Chapter 3 &4. 53–67. doi:10.1016/b978-0-12-382229-1.00004-7
- v www.nodexlgraphgallery.org
- vi Anderson, J. E. 1979. Public policy making, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- vii Fischer, Dkk. 2007. Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods. (Public administration and public policy ; 125). CRC Press Taylor & Francis Group.
- viii Muflihah dkk. 2016. Pengaplikasian Teori Graf pada Analisis Jejaring Sosial Dalam Struktur Organisasi Unisba di Bawah Pimpinan Warek I Menggunakan Aplikasi Microsoft Nodexl. Prosiding Matematika. Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. ISSN: 2460-6464. Vol. 2 No.2 Agustus 2016.

Adapun manfaatnya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjamin investasi yang sehat, kemudian membantu LJK dalam mendanai berbagai investasi yang aman bagi lingkungan, sosial dan tatakelola, sedangkan bagi masyarakat baik penerima manfaat atau terkena dampak langsung dapat mengetahui arti pentingnya investasi yang sehat dan berkelanjutan.

METODE KAJIAN

Untuk mengetahui aktor penting dan berpengaruh dalam proses pelaksanaan keuangan berkelanjutan pada sektor Kehutanan (HTI) dan Perkebunan (sawit) dilakukan dengan wawancara snowball dengan menemukan narasumber kunci dan kemudian mengembangkan wawancara mengikuti masukan narasumber kunci tersebut, Proses ini akan berhenti ketika mengalami kejenuhan informasi dari berbagai narasumber.

Proses pengumpulan data kemudian di formulasikan dalam bentuk survey questioner terstruktur dengan bantuan matrik informasi yang telah didapatkan dari snowball sebagai bahan verifikasi dengan teknik wawancara mendalam, wawancara terfokus dan studi dokumen, kemudian membangun analisa dan sintesis berdasarkan Model Peran aktor terhadap kebijakan public dalam hal ini keuangan berkelanjutan, dengan analisa jejaring social (Riddle. Dkk, 2005)ⁱⁱ dan alat untuk mengetahui pemetaan para aktor dan keterlibatannya dalam proses pelaksanaan keuangan berkelanjutan dengan menggunakan NodeXLⁱⁱⁱ yang dikembangkan oleh Hansen D. L (2011)^{iv} sebuah program open source terkait social network analysis yang berbentuk templet untuk Microsoft Excel (2007, 2010, 2013 dan 2016) pada operasi sistem windows (XP, Vista, 7, 8, dan 10)^v.

PEMBAHASAN

Secara garis besar, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan kebijakan bisa saja berasal dari non pemerintahan^{vi} dalam hal ini, pada proses pelaksanaan keuangan berkelanjutan pada sektor kehutanan (HTI) dan Perkebunan (Sawit) di Provinsi Papua baik sebagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan di kategorikan dalam 4 kelompok, yaitu:





Dalam proses pelaksanaannya, diasumsikan sebagai peranan kewenangan dari masing-masing aktor tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Sabatier dan Mazmanian (1979)^{vii} dalam pelaksanaan kebijakan, bahwa untuk memudahkan proses pelaksanaan kebijakan diawali dengan memisahkan antara pembentukan kebijakan dengan pelaksanaan kebijakannya, bisa dilihat dari sisi representative pemerintahan. Hal ini dikategorikan menjadi 6 kriteria:

- Tujuan pembentukan kebijakan yang jelas dan konsisten
- Berdasarkan teori kausal yang valid (memiliki referensi yang jelas)
- Proses implementasi kebijakan yang terstruktur memadai
- Komitmen pejabat pelaksana kebijakan dalam capaian tujuan
- Mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk badan eksekutif dan legislatif
- Tidak ada yang termarginalkan (dirugikan) dalam kerangka sosial ekonomi.

Dari perspective issue pada pendahuluan diatas, temuan-temuan proses pelaksanaan keuangan berkelanjutan untuk sektor kehutanan (HTI) dan Perkebunan (Sawit) di

Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

- Pengetahuan dan Pemahaman terhadap keuangan berkelanjutan masih tergolong minim
- Pelaksanaan tujuan keuangan berkelanjutan di papua belum sepenuhnya dapat diterapkan untuk sektor lahan (HTI dan Sawit, hanya untuk sebatas kewenangan lembaga jasa keuangan)
- Potensi Papua dalam pelaksanaan pembangunan daerah memiliki substansi yang sama dengan keuangan berkelanjutan hanya saja belum terintegrasikan dengan proses tujuan keuangan berkelanjutan
- Komitmen pejabat pelaksana keuangan berkelanjutan (BAPPEDA, DKLH, DPP, DPMPTSP, OJK) di papua sudah menyatakan siap mendukung dan perlu implementasi pada sektor-sektor penghasil PDRB yang potensial.

PEMETAAN AKTOR

Dalam implementasi keuangan berkelanjutan, peran para aktor akan sangat menentukan tingkat keberhasilan proses tersebut. Pemerintah daerah sebagai aktor yang memiliki peran paling penting untuk memastikan kondisi investasi yang sehat di daerah juga masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak lainnya, seperti lembaga keuangan, mitra pembangunan daerah dan juga pelaku investasi sendiri baik pada sektor kehutanan maupun perkebunan.





Adapun penilaian aktor yang berkepentingan terhadap keuangan berkelanjutan ditentukan berdasarkan 6 kategori (dari berbagai sumber dalam Muflihah dkk, 2016)^{viii} yaitu →

Yang mana pengkategorisasian ditentukan berdasarkan nilai-nilai kemampuan para aktor pada jejaring sosialnya dalam NodeXL seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 dibawah ini

1. **In Degree (ID)** → kemampuan aktor-aktor untuk berhubungan dengan seorang aktor
2. **Out Degree (OD)** → kemampuan aktor-aktor untuk berhubungan dengan aktor lainnya
3. **Betweenness Centrality (BC)** → mengukur banyaknya koneksi suatu aktor dengan aktor lainnya
4. **Closeness Centrality (CC)** → menentukan informasi (informan) yang dapat menyebarkan informasi kepada aktor-aktor lainnya
5. **Eigenvector Centrality (EC)** dan → mengukur kepentingan dan atau besarnya pengaruh aktor terhadap aktor lainnya (simpul jaringan) yang dapat membawa perubahan
6. **Clustering Coefficient (CF)** → mengukur sejauh mana aktor yang cenderung mengelompok.

Tabel 1. Penilaian Aktor dalam Proses Keuangan Berkelanjutan sektor HTI dan Sawit Di Provinsi Papua.

Labels	Graph Metrics						
	Degree	In-Degree	Out-Degree	Betweenness Centrality	Closeness Centrality	Eigenvector Centrality	Clustering Coefficient
BAPPEDA	8	8	5	11.405	0.083	0.136	0.393
DKLH	4	4	2	0.000	0.056	0.081	0.667
DPP	4	4	2	0.000	0.056	0.081	0.667
PEMKAB	5	1	5	5.857	0.067	0.084	0.400
DPMPTSP	7	7	6	7.152	0.077	0.124	0.405
LJK	7	7	4	24.443	0.077	0.106	0.357
APHI	6	3	4	5.871	0.071	0.109	0.533
GAPKI	6	3	4	5.871	0.071	0.109	0.533
OJK PROV	3	3	2	1.000	0.050	0.036	0.500
CSO	6	0	6	2.400	0.063	0.109	0.600
OJK NAS	2	2	2	0.000	0.048	0.024	1.000

Terlihat pada tabel 1. Penilaian Aktor dalam Proses Keuangan Berkelanjutan Di Provinsi Papua. Bahwa kemampuan Bappeda dalam menghubungkan dengan para pihak seperti DKLH, DPP, DPMPTSP, APHI, GAPKI, LJK, CSO dan Pemkab sangat dominan, hal ini ditunjukkan dengan nilai tertinggi yaitu 8 (ID) sehingga memiliki tanggung jawab

untuk dapat menyatukan tujuan dan sasaran keuangan berkelanjutan kepada aktor lainnya. Adapun aktor penting yang dapat membantu Bappeda untuk menghubungkan informasi keuangan berkelanjutan kepada aktor lainnya yaitu DPMPTSP dan CSO yang memiliki nilai sama besar yaitu 6 (OD).





DAFTAR ISTILAH

APHI	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
BAPPEDA	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BC	Betweenness Centrality
CC	Closeness Centrality
CF	Clustering Coefficient
CSO	Civil Society Organization
DKLH	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPP	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
EC	Eigenvector Centrality
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
HTI	Hutan Tanaman Industri
ID	In-Degree
KB	Kuangan Berkelanjutan
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
OD	Out-Degree
OJK NAS	Otoritas Jasa Keuangan Nasional
OJK PROV	Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua
PDRB	Pendapatan Domestik Regional Bruto
PEMKAB	Pemerintah Kabupaten
RAKB	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDGs	Sustainable Development Goals
SDM	Sumberdaya Manusia

Dari sisi tanggung jawab sosialisasi keuangan berkelanjutan untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman keuangan berkelanjutan dipimpin oleh LJK dengan nilai kemampuan berhubungan dengan aktor lainnya yang cukup tinggi yaitu 24,443 (BC) dan dibantu oleh Bappeda 11,405 (BC), artinya semakin tinggi nilai between centrality maka memiliki nilai pengantar komunikasi yang kuat dalam suatu jaringan.

Penilaian terhadap pembawa informasi kepada aktor lainnya dalam proses pelaksanaan keuangan berkelanjutan berada pada Bappeda, hal ini terlihat pada CC yang paling tinggi yaitu 0,083. Artinya Bappeda banyak mengenal dengan aktor lain, namun belum tentu dekat dan mengetahui secara detil. Kedekatan ini dapat dianggap sebagai ukuran seberapa cepat waktu yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada aktor yang lainnya.

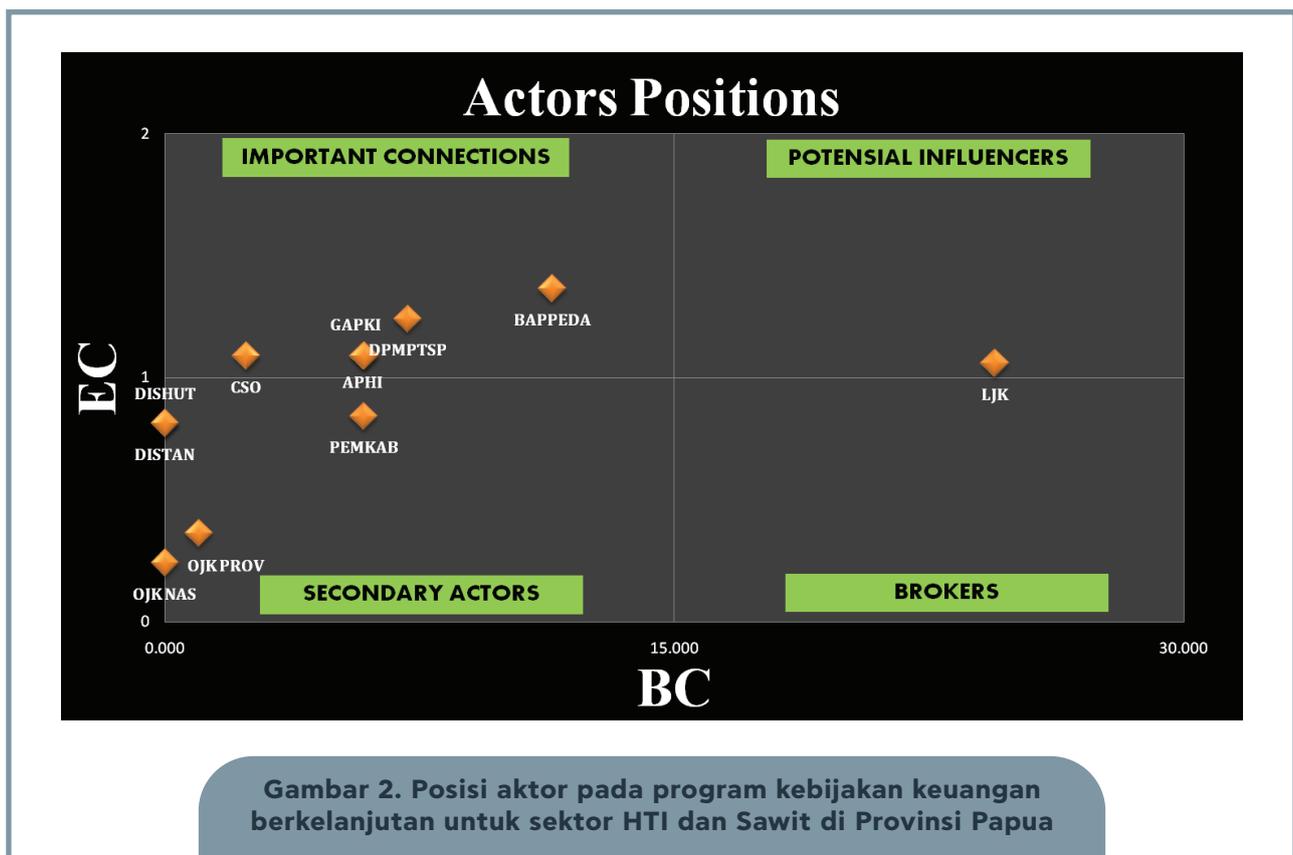
Begitu juga dengan penilaian pada sisi aktor penting dan memiliki pengaruh terhadap proses keuangan berkelanjutan, dimana BAPPEDA memiliki nilai 0,136 (EC) yang kemudian dibawahnya DPMPTSP dengan nilai 0,124 (EC) artinya Bappeda dan DPMPTSP memiliki hak dan tanggung jawab sosialisasi dan pelaksanaan dalam proses keuangan berkelanjutan kepada aktor lainnya dengan tujuan integrasi dengan program daerah dan target tercapainya investasi dengan nilai tambah pada PDRB.

Terakhir adalah penilaian terhadap aktor yang cenderung mengelompok dalam suatu simpul jaringan, dimana OJK Nasional memiliki nilai terbesar yaitu 1 (CF) Hal ini menunjukkan bahwa OJK Nasional memiliki kelompok yang terhubung dengan sempurna dengan kata lain bagian-bagian tersebut ada pada satu kelompok yang semua aktornya terhubung satu sama lain yaitu LJK sebagai pembawa informasi keuangan berkelanjutan. Kecenderungan ini sangat dominan namun tidak berlaku untuk kelompok lainnya seperti pemerintah daerah, pengusaha, ataupun CSO sehingga akan berpengaruh terhadap capaian keuangan berkelanjutan, dimana kebijakan keuangan berkelanjutan dibuat oleh OJK Nasional tetapi tidak terhubung langsung dengan aktor-aktor di daerah yang memiliki pengaruh penting, familiar dengan aktor lain, ataupun aktor yang memiliki tanggung jawab langsung dengan aktor lain.



Dari sisi program keuangan berkelanjutan untuk sektor HTI dan Sawit, aktor kunci yang akan membawa perubahan kebijakan keuangan berkelanjutan akan ditentukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, baik secara pengambilan keputusan maupun proses berlangsungnya program itu sendiri. Terlihat pada gambar 2. Posisi aktor pada program kebijakan keuangan berkelanjutan untuk sektor HTI dan Sawit di Provinsi Papua.

Terlihat pada grafik kuadran tersebut aktor yang menempati posisi potensial berpengaruh dalam pelaksanaan program adalah hanya lembaga jasa keuangan, hanya saja butuh perantara penghubung untuk pelaksanaannya, terlihat pada posisi brokers tidak ada satupun aktor yang dapat dijadikan sebagai perantara program, hal ini disebabkan karena masih adanya perbedaan kepentingan, maksud dan tujuan program yang belum terintegrasi dengan kepentingan



daerah. Adapun aktor penting yang dapat terkoneksi dengan aktor lainnya dalam mengembangkan program tersebut sesuai urutannya adalah Bappeda, DPMPTSP, GAPKI dan APhi kemudian CSO. Aktor-aktor ini penting untuk dilakukan peningkatan kapasitas untuk dijadikan sebagai agen sosial dalam mengembangkan program keuangan berkelanjutan di sektor HTI dan Sawit. Aktor lainnya seperti PEMKAB, OJK PROV, DISTAN, DISHUT, dan OJK NAS hanya sebagai penerima manfaat dan mungkin bisa saja hanya sebagai penonton.

Otoritas jasa keuangan provinsi maupun nasional yang seharusnya duduk bersama dengan lembaga jasa keuangan pada posisi potensi yang berpengaruh tidak terjadi, hal ini dikarenakan belum adanya konektifitas program kebijakan dengan kepentingan daerah, sehingga program kebijakan yang dikembangkan OJK nasional dan provinsi belum tersampaikan dengan jelas kepada aktor di provinsi maupun daerah, satu sisi program kebijakan tersebut baru sebatas untuk kepentingan lembaga jasa keuangan.



PERAN AKTOR

Peran para aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan keuangan berkelanjutan adalah aktor-aktor yang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas pokok yang diembannya, seperti yang terlihat pada table 2. Tugas pokok aktor kunci dalam proses pelaksanaan keuangan berkelanjutan pada sektor HTI dan Sawit di Provinsi Papua.

Table 2. Tugas pokok aktor kunci dalam proses pelaksanaan keuangan berkelanjutan pada sektor HTI dan Sawit di Provinsi Papua.

Aktor/Lembaga	Tugas/Peranan
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Bidang Perencanaan Kehutanan)	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji, merumuskan dan melaksanakan pembinaan Pemanfaatan produksi dan Sarana Produksi Hasil Hutan, Pengolahan dan Pengujian Hasil Hutan dan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan luran Hasil Hutan. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan data kehutanan dan petunjuk teknis pengawasan lahan hutan dan inventarisasi keadaan dan potensi lahan dan menyusun pola petunjuk operasional penghijauan, pembinaan benih dan sertifikasi hutan.
Dinas Pertanian dan Pangan (Bidang Perkebunan)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesejahteraan petani dan kapasitas kelembagaan dalam manajemen keuangan Pemasaran produk hasil perkebunan.
BAPPEDA (Bidang Ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Penyediaan dan pengembangan data dan informasi Penyusunan rencana pembangunan ekonomi
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatkan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Meningkatkan Iklim Investasi dan Realisasi Investaso
Otoritas Jasa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif Menyiapkan berbagai prioritas kebijakan di sektor perbankan, pasar modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan edukasi perlindungan konsumen. Membuka akses terhadap jenis keuangan berkelanjutan terhadap bank-bank dan kreditur lainnya.
CSO	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten melalui berbagai kegiatan untuk peningkatan tata kelola hutan dan lahan serta pendampingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan lingkungan yang berkelanjutan di Papua
Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan rencana pelaksanaan keuangan berkelanjutan tingkat provinsi kedalam visi dan misi pemerintah daerah Melaksanakan kebijakan ditingkat tapak dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat asli papua Melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi dan peninjauan kembali pemanfaatan izin pemanfaatan hutan dan izin konsesi tanaman perkebunan
Pengusaha HTI	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku Investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan melakukan kewajiban restorasi/reforestasi.
Pengusaha Sawit	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku Investasi dan perlindungan wilayah HCV dan HCS





REKOMENDASI

Dari hasil serangkaian proses diskusi dan telah dokumen yang dilakukan tim assessment bersama para pihak terkait tentang konteks Keuangan Berkelanjutan pada sektor Industri Kehutanan (HTI) dan Industri Perkebunan (Kelapa Sawit) di Provinsi Papua maka dapat disimpulkan beberapa rekomendasi sebagai tahapan tindak lanjut, antara lain:

1. Dalam pelaksanaan proses keuangan berkelanjutan untuk sektor kehutanan (HTI) dan Perkebunan (Kelapa Sawit) di Provinsi Papua, aktor penting yang dapat dijadikan dalam pendekatan pelaksanaannya didominasi oleh Bappeda yang berperan sebagai aktor penghubung antar aktor, pembawa informasi dan sosialisasi, serta memiliki pengaruh penting dalam integrasi keuangan berkelanjutan dengan perencanaan daerah untuk nilai tambah PDRB sektor kehutanan dan perkebunan.
2. Keberlangsungan program keuangan berkelanjutan sektor HTI dan Sawit sangat ditentukan oleh kebijakan lembaga jasa keuangan yang menempati posisi sebagai aktor yang berpotensi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
3. Masalah utama yang sering muncul adalah pemahaman dan pengetahuan keuangan berkelanjutan itu sendiri sehingga penting bagi OJK Nasional maupun provinsi untuk saling menguatkan sosialisasi terutama kepada Bappeda sebagai penghubung penting antar aktor.
4. Membangun konektivitas langsung antar pelaksana keuangan berkelanjutan dibutuhkan dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan di daerah, walaupun sangat dimaklumi program nasional keuangan berkelanjutan baru sebatas untuk LJK.
5. Penting juga untuk ditindak lanjuti kajian ini terhadap hubungan LJK dengan pelaku industrialisasi hilir kehutanan dan perkebunan sehingga dapat diketahui seberapa besar tanggung jawab Aktor (pelaku usaha) dalam proses keuangan berkelanjutan tersebut.



Jl. Azimar 1 No. 26 RT 001 RW 009,
Tegal Gundil, Kecamatan Bogor
Utara, Kota Bogor Jawa Barat,
16153 - Indonesia

Telepon: +62 251 836 7837

Email: office@tuk.or.id

Website: www.tuk.or.id

